

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Pencegahan Kecurangan

###### 2.1.1.1 Definisi Kecurangan (*Fraud*)

*Fraud* menurut standar *The Institute of Internal Auditors* tahun 2013 dalam Diaz Priantara (2013:4) adalah

*“Any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of trust. These acts are not dependent upon the threat of violence or physical force. Frauds are perpetrated by parties and organizations to obtain: money, property, or services; to avoid payment or loss services; or to secure personal or business advantage”*

Yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dicirikan dengan pengelabuan atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan uang, aset, jasa, atau mencegah pembayaran atau kerugian atau untuk menjamin keuntungan/manfaat pribadi dan bisnis. Perbuatan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan oleh pelaku terhadap orang lain

Sedangkan menurut W. Steve Albrecht dan Chad D. Albrecht di dalam buku Karyono (2013:3) menyebutkan bahwa *fraud* adalah suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan dengan cara kekerasan oleh seorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. Tidak terdapat definisi atau aturan yang dapat digunakan sebagai suatu pengertian umum dalam mengartikan *fraud* yang meliputi cara yang

mengandung sifat mendadak, menipu, cerdik dan tidak jujur yang digunakan untuk mengelabui seseorang. Satu-satunya batasan untuk mengetahui pengertian diatas adalah yang membatasi sifat ketidakjujuran manusia.

Menurut Karyono (2013:4), *fraud* dapat juga diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan orang lain.

#### **2.1.1.2 Definisi Pencegahan Kecurangan**

Menurut Karyono (2013:48), pencegahan *fraud* merupakan aktivitas memerangi *fraud* dengan biaya murah. Upaya pencegahan *fraud* akan memberi penghematan yang besar karena biaya deteksi, investigasi, dan proses peradilan dapat ditekan, bahkan dapat ditiadakan. Tindak *fraud* cenderung meningkat, oleh karena itu upaya pencegahan harus didukung oleh seluruh pelaku organisasi baik para manajer maupun seluruh karyawan.

Menurut Diaz Priantara (2013:184) pencegahan kecurangan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang melakukan *fraud* dengan membangun dan menerapkan manajemen risiko (khususnya manajemen risiko *fraud*), pengendalian intern dan tata kelola yang jujur.

Menurut Amrizal (2004:4) pencegahan *fraud* yaitu usaha untuk menghilangkan atau meminimalisir sebab-sebab akan terjadinya suatu perbuatan curang dan akan lebih mudah daripada mengatasi apabila kecurangan sudah terjadi.

### **2.1.1.3 Kondisi Penyebab *Fraud***

Salah satu penyebab kecurangan adalah kepribadian yang menggerogoti integritas seseorang. Subagio (2016) menyatakan bahwa akar masalah terjadinya kecurangan adalah kurangnya integritas aparatur negara, dimana dalam integritas terkandung kualitas moral dan sikap yang jujur, bijak, adil untuk melakukan hal yang benar dalam segala situasi

Menurut G. Jack Bologna (2006) yang sudah dikutip oleh Karyono (2013), 4 faktor pendorong seseorang melakukan *fraud*, yaitu:

a. *Greed* (Keserakahan)

Berkaitan dengan moral dan perilaku serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang

b. *Opportunity* (Kesempatan)

Berkaitan dengan keadaan organisasi dan instansi yang kondisi pengendaliannya lemah, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.

c. *Need* (Kebutuhan)

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya secara wajar

d. *Exposure* (Pengungkapan)

Berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan. Semakin besar kemungkinan suatu kecurangan dapat diungkap/ditemukan, semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut. Semakin berat hukuman kepada pelaku kecurangan akan semakin kurang dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut. Semakin berat hukuman kepada pelaku kecurangan akan semakin kurang dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan. Pengungkapan suatu tindak kecurangan tidak menjamin tidak terulangnya tindak kecurangan tersebut, baik pelaku yang sama maupun pelaku yang lain.

Menurut Karyono (2013:6) penyebab kecurangan adalah :

1. Individu
  - a. Manusia dalam melaksanakan kecurangan pada dasarnya bertindak rasional dan penuh perhitungan untuk menghindari hukuman dan mencapai keberhasilan.
  - b. Tindakan kecurangan didorong oleh kondisi tersedianya kesempatan yang cocok, pengawasan yang lemah, dan terdapat motivasi pendorong.
  - c. Perilaku kecurangan juga ditentukan oleh faktor biologis dan bawaan sejak lahir.
  - d. Perkembangan moral, intelektualitas, faktor kegagalan, dan frustrasi merupakan faktor pendorong.
  - e. Perilaku kecurangan dapat berupa hasil dari proses mental kepribadian

sejak masa kanak-kanak.

- f. Faktor lingkungan berpengaruh pada tingkat kriminalitas di suatu daerah.
- g. Pengaruh struktur sosial yaitu struktur sosial individu dan interaksi sosial psikologis.
- h. Semua orang berpotensi melakukan kecurangan jika keadaan mendukung.

## 2. Organisasi

Penyebab kecurangan dalam organisasi pada umumnya dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Patologi individu yang menurut kata hati yang bermotivasi mengejar kesenangan pribadi.
- b. Patologi organisasi yaitu organisasinya kondusif untuk tindakan kecurangan yang berakibat memprioritaskan keuntungan dan moral rendah.
- c. Patologi sosial budaya yaitu menganut budaya konsumerisme dan materialisme sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

### 2.1.1.4 Jenis-Jenis Kecurangan (*Fraud*)

Menurut *Association of Certified Fraud Examination (ACFE-2000)* yang telah dikutip oleh Amrizal (2004) menyebutkan kategori kecurangan ada tiga kelompok yaitu:

- a. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor.

Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non financial.

b. Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam 'Kecurangan Kas' dan 'Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya', serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).

c. Korupsi (*Corruption*)

Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian *illegal* (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*) (*Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE-2000)).

Tunggal (2009) mengatakan bahwa jenis-jenis kecurangan adalah sebagai berikut:

a. Kecurangan yang merugikan perusahaan

Kecurangan yang biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang menengah ke bawah. Biasanya dalam bentuk pencurian harta milik perusahaan. Dalam hal ini tentu perusahaanlah yang menjadi korban tindakan kecurangan tersebut

b. Kecurangan yang menguntungkan perusahaan

Kecurangan ini biasanya dilakukan oleh karyawan yang menduduki posisi *top management*. Kecurangan dalam bentuk ini biasanya berupa pencatatan laba dan aktiva yang lebih besar dan mencatat biaya-biaya lebih rendah. Selain itu juga perusahaan tidak mencatat retur penjualan

dan lainnya.

Menurut *Examination Manual 2006* dari *Association of Certified Fraud Examiner*, kecurangan (*fraud*) dalam Karyono (2013:17) mengkategorikan kecurangan terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

1. Kecurangan Laporan (*Fraudulent Statement*) yang terdiri atas Kecurangan Laporan Keuangan dan Kecurangan Laporan Lain.
2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*) yang terdiri atas Kecurangan Kas dan Kecurangan Persediaan dan Aset Lain.
3. Korupsi (*Corruption*) yang terdiri atas Pertentangan Kepentingan, Penyuapan, Hadiah Tidak Sah, dan Pemerasan Ekonomi.
4. Kecurangan yang berkaitan dengan komputer.

#### **2.1.1.5 Pencegahan Terjadinya Kecurangan**

Menurut Steve W. Albrecht, Chad O. Albrecht, dan Mark F. Zimbelman (2008) dalam Diaz Priantara (2013) tahap awal pencegahan kecurangan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang melakukan *fraud* dengan membangun dan menerapkan manajemen risiko (khususnya manajemen risiko *fraud*), pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang jujur.

Menurut *GONE Theory* yang telah dikutip oleh Diaz (2013), langkah-langkah untuk meminimalisasi faktor pendorong terjadinya kecurangan adalah sebagai berikut:

1. Keserakahan (*Greeds*)
  - a. Mendorong pelaksanaan umat menjalankan ibadah agama secara benar
  - b. Perbaiki sistem pendidikan
  - c. Peningkatan fasilitas umum diantaranya transportasi
  - d. Pembinaan atau penerapan secara konsisten kode etik pegawai.
2. Kesempatan (*Opportunities*)
  - a. Peningkatan kualitas pengendalian internal pada setiap unit organisasi
  - b. Peningkatan keteladanan dari setiap pimpinan organisasi
  - c. Mengembangkan kepemimpinan yang tangguh
  - d. Menetapkan etika dan aturan perilaku bagi setiap profesi
3. Kebutuhan (*Needs*)
  - a. Perbaiki pendapatan gaji yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerjanya
  - b. Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan
  - c. Sistem kerja dan penghargaan yang wajar sehingga karyawan merasa diperhatikan secara adil
4. Pengungkapan (*Exposure*)
  - a. Pelaksanaan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku kecurangan
  - b. Bentuk pranata hukum yang tegas
  - c. Penyebarluasan produk hukum

Karyono (2013:59-61) mengatakan bahwa pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan menjabarkan berbagai sarana kendali. Sarana kendali dimaksud

adalah dengan menciptakan kebijakan, prosedur, organisasi, teknik pengendalian, menciptakan teknik-teknik pengendalian yang efektif dan peran serta pegawai.

Suatu organisasi/perusahaan harus membuat kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan atau suasana kerja yang kondusif untuk menghadapi dan menangkal tindakan kecurangan (*fraud*). Manajemen dan seluruh karyawan harus mempunyai komitmen yang sama untuk mencegah kecurangan dan penyimpangan lain.

Prosedur tertulis harus dibuat untuk mencegah kecurangan (*fraud*) dan untuk mendukung kebijakan. Dengan cara antara lain:

- a. Memuat pemisahan fungsi agar tercipta kondisi saling cek antar fungsi
- b. Memuat sistem kaji ulang agar dapat mendeteksi secara dini kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam kegiatan yang ada
- c. Memuat sistem pelaporan dan ketentuan untuk menindak pelaku kecurangan

Rancangan struktur pengendalian yang tidak andal dan kelemahan dalam pelaksanaannya akan menjadi sumber atau peluang terjadinya kecurangan (*fraud*).

Berikut ini disajikan teknik-teknik pengendalian yang efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*) antara lain:

- a. Adanya pembagian tugas yang jelas
- b. Pendokumentasian dan pencatatan yang memadai
- c. Pengendalian yang memadai terhadap akses ke terminal komputer, terhadap data yang diolah dalam pemrosesan, maupun terhadap program-program serta media pendukung lainnya

- d. Adanya manual pengendalian terhadap file-file yang dipergunakan dalam pemrosesan komputer ataupun pembuangan file (*disposal*) yang sudah tidak dipakai
- e. Adanya sistem pengendalian fisik secara langsung terhadap harta atau aset
- f. Adanya *review* internal secara rutin dan teratur terhadap semua kegiatan dan transaksi

Organisasi/perusahaan hendaknya mempunyai staf atau pegawai yang berpengalaman dan mempunyai sifat ingin tahu, curiga dan peka terhadap sinyal-sinyal adanya kecurangan (*fraud*)

## **2.1.2 Pengendalian Internal**

### **2.1.2.1 Definisi Pengendalian Internal**

Menurut Romney & Steinbart (2015) Pengendalian internal adalah sebuah proses yang diimplementasikan untuk memberikan jaminan yang memenuhi beberapa objektif dari pengendalian internal, diantaranya yaitu menjaga aset perusahaan, menjaga catatan dalam detail yang cukup untuk pelaporan aset perusahaan yang tepat dan akurat, menyediakan laporan keuangan dengan kriteria yang ditentukan, mendorong dan meningkatkan efisiensi operasional, mendorong ketaatan dalam hal manajerial dan memenuhi persyaratan dari regulasi dan peraturan yang ada.

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2013) yang dikutip dari *Committee of Sponsoring Organization* (COSO) pengendalian internal adalah proses yang

dirancang, diimplementasikan dan dikelola oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, manajemen, dan karyawan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tercapainya tujuan entitas mengenai keandalan pelaporan keuangan, efektif dan efisiensinya operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut COSO yang telah dikutip oleh Karyono (2013) adalah pengendalian intern disebut pengendalian dalam arti dinamis, sedangkan pengendalian sebelumnya disebut statis. Pengendalian dalam arti statis menganggap pengendalian sebagai suatu proses atau sebagai alat untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan diukur pula dengan perbandingan biaya dan manfaat.

#### **2.1.2.2 Tujuan Pengendalian Internal**

Menurut Arens *et al.*, (2015) tujuan pengendalian internal, yaitu:

a. **Reliabilitas Pelaporan Keuangan**

Untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan sejara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporannya. Tujuan pengendalian intern yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

b. **Efisiensi dan Efektivitas Operasi**

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan penting dari pengendalian ini adalah memperoleh

informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan

c. Ketaatan pada Hukum dan Peraturan

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan bahwa semua yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan berada dalam aturan yang berlaku.

Tujuan pengendalian intern menurut Baridwan (2012:13) adalah:

- a. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi
- b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi
- c. Memajukan efisiensi dalam operasi
- d. Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2013) yang dikutip dari *Committee of Sponsoring Organization (COSO)*, pengendalian Internal dapat dikatakan memadai apabila dapat mencapai tujuan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Keandalan Laporan Keuangan Entitas

Pengendalian yang berkaitan dengan masalah kewajaran laporan keuangan yang disajikan untuk pihak-pihak luar harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dimana manajemen bertanggung jawab atas kewajaran yang disajikan dalam laporan keuangan.

## 2. Efektivitas dan Efisiensi Operasi

Pengendalian Internal dimaksudkan untuk menghindari tanggung jawab rangkap sehingga perlu adanya pemisahan tugas antara berbagi fungsi. Pengendalian dalam suatu perusahaan yang salah satunya pemisahaan tugas adalah alat untuk mencegah pemborosan kegiatan yang tidak diperlukan dalam seluruh aspek, serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak efisien. Bagian terpenting dari efektifitas dan efisiensi adalah pengamanan aktiva dan catatan.

## 3. Kesesuaian dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan

Pengendalian Internal dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh peraturan dan kebijakan yang ada telah ditetapkan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan telah ditaati oleh para karyawan perusahaan.

### **2.1.2.3 Komponen Pengendalian Internal**

Menurut Kurt F Reding (2013) yang dikutip dari COSO, lima komponen pengendalian internal beserta prinsipnya adalah:

#### 1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian terdiri dari nilai-nilai integritas dan etika organisasi, partisipasi yang memungkinkan dewan direksi untuk melaksanakan tanggung jawab pengawasan pemerintahannya, struktur organisasi dan penugasan wewenang dan tanggung jawab, proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten,

dan kekakuan dalam ukuran kinerja, insentif, dan penghargaan untuk mendorong akuntabilitas atas kinerja.

## 2. Penilaian Resiko

Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan berdampak buruk pada pencapaian tujuan. Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko untuk pencapaian tujuan. Risiko terhadap pencapaian tujuan-tujuan ini dari seluruh entitas dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Dengan demikian, penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. Prasyarat untuk penilaian risiko adalah penetapan tujuan, terkait pada berbagai tingkat entitas. Manajemen menentukan tujuan dalam kategori yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan dengan kejelasan yang cukup untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis risiko terhadap tujuan tersebut. Manajemen juga mempertimbangkan kesesuaian tujuan untuk entitas. Penilaian risiko juga mengharuskan manajemen untuk mempertimbangkan dampak dari kemungkinan perubahan di lingkungan eksternal dan perubahan pada sistem pengendalian internal.

## 3. Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang diambil oleh manajemen, dewan, dan pihak lain untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kemungkinan tujuan dan sasaran yang ditetapkan akan tercapai. Manajemen merencanakan, mengatur, dan mengarahkan kinerja tindakan

yang memadai untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan dan sasaran akan tercapai. Seperti ditunjukkan oleh COSO, “Aktivitas pengendalian dilakukan di semua level [organisasi], pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan di atas lingkungan teknologi. Mereka mungkin bersifat preventif atau detektif dan dapat mencakup serangkaian kegiatan manual dan otomatis, seperti otorisasi dan persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan ulasan kinerja bisnis.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi berkualitas tinggi harus dikomunikasikan dengan tepat. Saling ketergantungan ini adalah alasan mengapa COSO menggabungkan informasi dan komunikasi dalam komponen ini. Informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu harus tersedia untuk individu di semua tingkatan organisasi yang membutuhkan informasi tersebut untuk menjalankan bisnis secara efektif. Informasi harus diberikan kepada personel tertentu yang sesuai untuk mendukung pencapaian tanggung jawab pengoperasian, pelaporan, dan kepatuhan mereka. Selain itu, komunikasi harus dilakukan secara lebih luas relatif terhadap harapan, tanggung jawab individu dan kelompok, dan hal-hal penting lainnya. Komunikasi dengan pihak eksternal juga penting dan dapat memberikan informasi penting tentang fungsi pengendalian. Pihak-pihak ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pelanggan, pemasok, penyedia layanan, regulator, auditor eksternal, dan pemegang saham

## 5. Kegiatan Pemantauan

Kegiatan pemantauan terdiri dari evaluasi berkelanjutan yang dibangun ke dalam proses bisnis di berbagai tingkat entitas yang memberikan informasi tepat waktu dan evaluasi pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen secara teratur

Menurut COSO yang telah dikutip oleh Karyono (2013), pengendalian internal terdiri dari 5 unsur yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian (*Control environment*)
- b. Penaksiran risiko (*Risk assessment*)
- c. Informasi dan komunikasi (*Information and communication*)
- d. Pemantauan (*Monitoring*)

*Internal Control Integrated Framework* yang dikeluarkan oleh COSO (2013), yaitu kerangka kerja pengendalian intern yang paling luas di Amerika Serikat, menguraikan lima unsur pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai. Prinsip pengendalian internal menurut COSO dalam YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit, (2015) meliputi hal-hal berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan Pengendalian adalah suasana kerja organisasi yang mempengaruhi kesadaran para anggota organisasi akan pentingnya pengendalian dan merupakan fondasi bagi efektivitas komponen

pengendalian dengan menyediakan disiplin dan keteraturan pelaksanaan.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian Risiko adalah penilaian terhadap berbagai risiko yang dihadapi organisasi baik yang berasal dari dinamika internal maupun eksternal.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat untuk menangani risiko telah dilaksanakan

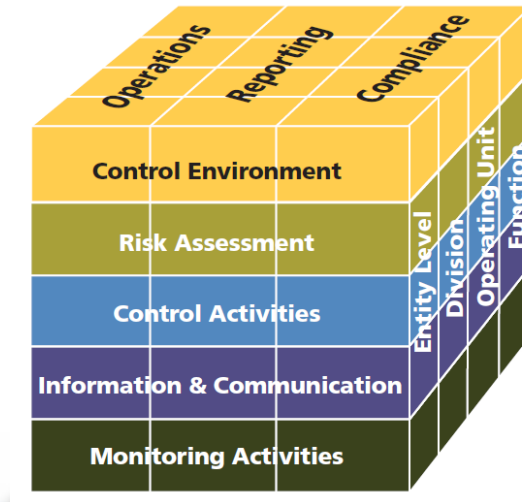
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Setiap komponen pengendalian harus terhubung dan terkoordinasi dengan baik melalui system informasi dan komunikasi yang digunakan oleh organisasi. Sistem tersebut digunakan untuk mengidentifikasi, menangkap dan mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dalam bentuk dan waktu yang tepat.

5. Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Kegiatan Pemantauan adalah proses untuk menilai kualitas sistem pengendalian sepanjang waktu.

Adapun hubungan diantara tujuan dan komponen-komponen pengendalian internal tersebut digambarkan oleh COSO (2013:5) dalam bentuk kubus sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

***Relationship of Objectivities and Components of Internal Control***

Sumber : COSO (2013:5)

Komponen-komponen sistem pengendalian internal saling terkait dan bersinergi membentuk sistem yang terintegrasi yang bereaksi secara dinamis terhadap perubahan-perubahan internal maupun eksternal. Sistem Pengendalian Internal akan sangat efektif jika pengendalian-pengendalian dibangun dalam infrastruktur organisasi dan merupakan bagian dari inti organisasi. Pengendalian yang efektif tersebut akan meningkatkan kualitas operasi, mendorong inisiatif, menghindari risiko dan kecepatan respon terhadap perubahan kondisi.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul	Hasil
1.	Rizki Hamdani dan Ahmad Riski Albar (2016:16) (Jurnal)	<i>Internal controls in fraud prevention</i>	<i>Reveals that some weaknesses of internal controls have been identified as one of the reasons of Fraud</i>  (Penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa kelemahan pengendalian internal telah diidentifikasi sebagai salah satu alasan kecurangan)
2.	R. Aryanti Ratnawati (2013:19) (Jurnal)	Pengendalian Internal Terhadap kecurangan	Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan ( <i>Fraud</i> )
3.	Dewi Sofianingsih (2014) (Jurnal)	Pengaruh Komponen Struktur Pengendalian Internal Untuk Mencegah Kecurangan Pada	Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan selalu menghadapi berbagai resiko yang biasanya disebut dengan resiko bisnis ( <i>bussiness risk</i> ). Termasuk diantaranya adalah resiko terjadinya kecurangan ( <i>fraud</i> ) yang tergolong dalam resiko integritas ( <i>Integrity Risk</i> ).

No.	Penulis	Judul	Hasil
		Perusahaan	
4.	Hermiyatti (2015) <i>(Journal)</i>	Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang	Pengaruh pada penerapan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan fraud
5.	Indah Fiola Tessamonica (2015) <i>(Skripsi)</i>	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Penegahan <i>Fraud</i> (Kecurangan)	Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Karyono (2013) mengatakan pencegahan kecurangan yang utama ialah dengan menetapkan sistem pengendalian internal dalam setiap aktivitas organisasi. Pengendalian internal agar dapat efektif mencegah kecurangan harus handal dalam rancangan struktur pengendalinnya dan praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

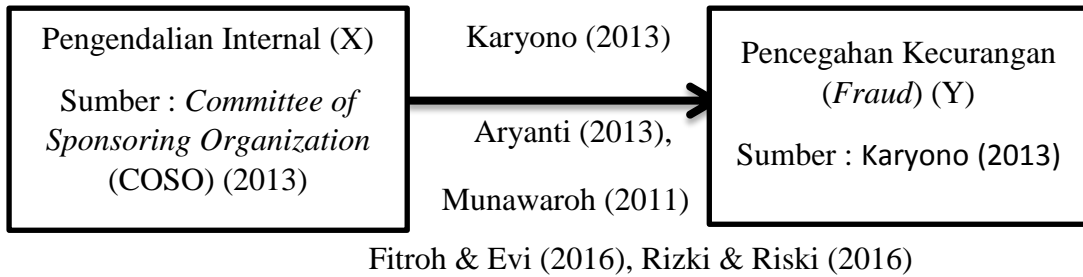
R. Aryanti Ratnawati Sukadwilinda (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Selain itu berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud*.

Munawaroh (2011) berpendapat bahwa pengendalian internal yang baik diperoleh dari suatu struktur yang terkoordinasi yang menyusun laporan keuangan yang lebih teliti, mencegah kecurangan dalam perusahaan, serta mengamankan harta perusahaan.

Fitroh Nurani dan Evi Octavia (2016) mengatakan efektifitas pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik efektifitas pengendalian internal perusahaan, akan diikuti pula oleh semakin baiknya pencegahan fraud.

Rizki Hamdani dan Ahmad Riski Albar (2016) mengungkapkan bahwa beberapa kelemahan pengendalian internal telah diidentifikasi sebagai salah satu alasan kecurangan

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :



**Gambar 2.3**

**Kerangka Penelitian**

**2.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dari kerangka penelitian, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H<sub>1</sub> : Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan